



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 68 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Satuan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Satuan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Satuan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Satuan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Satuan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SATUAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SATUAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Satuan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Satuan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Satuan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 68**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 68 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA SATUAN**  
**POLISI PAMONG PRAJA**  
**TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2023. Renja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kabupaten Garut tahun 2019 – 2024 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan langkah-langkah yang sistematis, rasional dan komprehensif melalui Misi satuan polisi pamong praja, adalah sesuai dengan Misi ke 1 Pemerintah Kabupaten Garut RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut:

**“ Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan Berbudaya.”**

Dengan tema pembangunan “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Insfrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/atau Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Satnadar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2019-2024 Kabupaten Garut;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 20J.6 Nomor27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor139);
42. Peraturan Bupati Garut Nomor 102 tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut;
43. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022;
44. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan program Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan perlindungan masyarakat Tahun 2023 di Kabupaten Garut dengan memperhatikan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemampuan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya organisasi yang dimiliki serta memperhatikan tantangan perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan di Kabupaten Garut;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Rensta Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Satpol PP sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satpol PP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Satpol PP tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satpol PP berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2006, dan PP Nomor 38 tahun 2007. indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Satpol PP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Satpol PP, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD, penjelasan temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten, bagaimana usulan program/kegiatan tersebut diperoleh dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta usulan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satpol PP.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan sasaran Tahun 2023.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya dan penegasan dalam menerapkan Renja serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2023 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sesuai dengan Rencana

Strategis (Rensta) Tahun 2014 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

Sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022 ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65 %
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	40 orang
2	Meningkatnya kinerja aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai Sakip	BB

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran beserta target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2022 dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)	
1	2	3	4			5	6		7		8=(7/6)		9	10		11		12	
					20.784.606.839		13.961.651.798		13.157.009.893		94,24		18.895.097.128		12.285.476.653		6.237.001.596		
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100	%	9.567.625.019		7.369.426.298	100	6.933.727.133	94	94,09	100	8.697.840.928	100	6.245.499.653	50	2.924.834.200	50	47
01.05.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	100	%	48.400.000		40.000.000	12	40.000.000	100	100,00	12	44.000.000	100	40.000.000	50	18.992.000	50	47
01.05.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	16	Dokumen	48.400.000		40.000.000	16	40.000.000	100	100,00	16	44.000.000	16	40.000.000	8	18.992.000	50	47

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)		
01.05.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	%	6.582.735.107		100	5.440.276.948	100	4.980.578.255	92	91,55	100	5.984.304.643	100	5.293.272.168	50	2.515.973.991	50	48
01.05.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN ( Satpol PP )	12	Bulan	6.516.439.207		12	5.385.486.948	12	4.926.277.755	91	91,47	12	5.924.035.643	12	5.268.272.168	6	2.503.473.991	50	48
01.05.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Sat. Pol. PP	10	Laporan	66.295.900		10	54.790.000	10	54.300.500	99	99,11	10	60.269.000	12	25.000.000	6	12.500.000	50	50
01.05.01.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100	%	764.095.640		100	631.484.000	100	597.954.000	95	94,69	100	694.632.400	100	291.236.800	0	-	-	0
01.05.01.06.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	200 dan 200	stel dan stel	764.095.640		200 dan 200	631.484.000	200 dan 200	597.954.000	95	94,69	200 dan 200	694.632.400	184	291.236.800	0	-	-	0
		Jumlah Pakaian Kerja Tertentu													100	275.869.296	50	136.663.470	50	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)				
01.05.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ( Satpol PP )	100	%	504.666.676		100	497.462.190	100	496.576.935	100	99,82	100	458.787.889	12	13.752.600	3	6.875.650	25	50			
01.05.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	16	Jenis	20.370.350		16	16.830.000	16	16.830.000	100	100,00	16	18.513.000	30 dan 10	59.937.496	8 dan 2	6.775.100	25	11			
01.05.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 dan 10	Jenis dan Jenis	79.268.672		30 dan 10	145.893.690	30 dan 10	145.254.885	100	99,56	30 dan 10	72.062.429	11 dan 30532	32.244.200	8 dan 25980	27.583.820	85	86			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor													1860		16.500.000		930	8.190.000	50	50	
01.05.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 dan 30532	Jenis dan Lembar	38.895.690		11 dan 30532	32.150.200	11 dan 30532	32.131.050	100	99,94	11 dan 30532	35.365.220	141	153.435.000	82	87.238.900	58	57			
01.05.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	12	Bulan	53.724.000		12	44.400.000	12	44.397.000	100	99,99	12	48.840.000	100	85.635.100	50	84.170.760	50	98			
01.05.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	141	Kali	312.407.964		78	258.188.300	78	257.964.000	100	99,91	141	284.007.240	0	-	0	-	-	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)	
01.05.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP )	100	%	923.738.090		100	147.868.000	100	138.800.000	94	93,87	100	839.761.900	5	85.635.100	5	84.170.760	100	98
01.05.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	Unit	829.539.480		5	147.868.000	4	138.800.000	94	93,87	5	754.126.800	100	57.606.289	50	27.657.129	50	48
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	5	Jenis	94.198.610		0							85.635.100	12	30.408.384	6	13.014.100	50	43
01.05.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ( Satpol PP )	100	%	81.369.306		100	64.715.160	100	81.797.700	100	126,40	100	73.972.096	100	27.197.905	50	14.643.029	400	54
01.05.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	33.453.306		12	27.647.360	12	44.730.300	162	161,79	12	30.412.096	100	201.880.000	50	141.376.850	50	70
01.05.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Upah kerja dan Peralatan Kebersihan	12 dan 4	Bulan dan Orang	47.916.000		12 dan 4	37.067.800	12 dan 4	37.067.400	100	100,00	12 dan 4	43.560.000	5	6.250.000	5	6.250.000	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)			
01.05.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik sesuai peraturan perundang-undangan ( Satpol PP )	100	%	662.620.200		100	547.620.000	100	598.020.243	109	109,20	100	602.382.000	50 dan 45	155.000.000	33 dan 30	100.131.850	66	65		
01.05.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	5	Kendaraan	10.890.000		5	9.000.000	5	9.000.000	100	100,00	5	9.900.000	1	30.000.000	1 dan 5	29.315.000	100	98		
01.05.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan Jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	50 dan 45	Kendaraan dan Kendaraan	285.088.100		50 dan 45	235.610.000	95	235.610.000	100	100,00	95	259.171.000	15	10.630.000	8	5.680.000	53	53		
01.05.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 dan 5	Lokal dan Lokal	353.925.000		1 dan 5	292.500.000	1 dan 5	342.910.243	1 dan 5	100,00	1 dan 5	48.840.000								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)					
		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	45	%	677.550.500		31	598.702.500				39,00	39	615.955.000										
01.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.175.601.920			5.977.035.500		5.300.836.760		89	85	9.250.547.200	85	5.436.285.000	48	3.031.994.796	56	56				
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	6	Jenis	6.765.737.990		6	4.702.200.000					6	6.150.670.900										
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan dan Trantibum dan Perlindungan masyarakat	2	Jenis	541.938.430		2	447.883.000					2	492.671.300										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)					
		Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas	1	Jenis	380.550.500		1	228.250.000					1	345.955.000								
		Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas	3	Jenis	287.375.000		3	237.500.000					3	261.250.000								
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas	100	%	2.200.000.000		100	361.202.500					100	2.000.000.000								
01.05.02.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Patroli	360	Kali	2.280.497.890		360	1.884.709.000	12	1.817.949.350	96	96,46	12	2.073.179.900	12	1.456.400.000	6	747.046.820	50	51		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)		
		Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	22	Kali			18													
		Jumlah Pengamanan dan Pengawalan	200	Kali			194													
01.05.0 2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkadamelalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban	420	Kali	4.485.240 .100		381	2.817.491.000	12	2.493.982.910	89	88,52	12	4.077.491.00 0	12	2.767.000.000	6	1.388.035.9 76	50	50
		Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	36	Kali			30													
01.05.0 2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	131	Kali	165.013.7 50		131	136.375.000	260	84.230.500	62	61,76	260	150.012.500	121	68.187.000	27	15.382.000	22	23

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)		
01.05.0 2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Satlinmas dalam Tibum Tranmas	260	Kali	287.375.000		260	237.500.000	260	285.894.500	120	120,38	260	261.250.000	200 dan 60	145.000.000	90 dan 10	55.997.000	38	39
		Jumlah Pemantauan Penanganan Bencana	125	Kali			125													
		Jumlah Pelaksanaan Jambore Satlinmas	120	Orang			0													
01.05.0 2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugasyang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pembinaan Aparatur SatpolPP	90	Orang	380.550.500		150	228.250.000	70	157.208.000	69	68,88	70	345.955.000	40 dan 30	154.846.000	30 dan 25	111.578.000	79	72
		Jumlah Pembinaan Satlinmas	250	Orang			0													
		Jumlah Pengawasan Kegiatan Penanganan Tibumtranmas	40	Kali			40													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)		
01.05.0 2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan	4	Kali	376.924.680		4	311.508.000	4	120.727.000	39	38,76	4	342.658.800	4	120.000.000	2	46.545.000	50	39
01.05.0 2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Satlinmas	215	stel	2.200.000.000		215	361.202.500	221	340.844.500	94	94,36	221	2.000.000.000	215 dan 6	724.852.000	215 dan 6	667.410.000	100	92
		Jumlah Sarana dan Prasarana tibumtranmas yang terpelihara.	6	unit			6													
01.05.0 2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	3	jenis	744.379.900		3	615.190.000	85	922.446.000	85	149,94	85	676.709.000	85	513.692.000	48	265.392.600	56	52

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)		Tingkat Realisasi (%) TW (2)		
01.05.02.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada	56	kali	212.960.000		56	176.000.000	12	142.234.000	81	80,81	12	193.600.000	56	64.148.000	37	42.235.000	66	66
01.05.02.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	40	kali	79.775.300		40	65.930.000	12	65.920.000	100	99,98	12	72.523.000	84	64.251.000	44	32.279.000	52	50
01.05.02.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	21	perda dan perkada	451.644.600		21	373.260.000	12	714.292.000	191	191,37	12	410.586.000	292 dan 322	385.293.000	150 dan 160	190.878.600	50	50
01.05.02.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SatpPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	20	orang	297.000.000		0	-			0,00		270.000.000	85	90.000.000	0	14.780.000	-	16	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai dengan tahun 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (TW 2)	
01.05.02.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Aparatur PPNS yang mengikuti Bimtek Pengembangan karir	10	orang	297.000.000		0	-	-	0,00		270.000.000	25	90.000.000	0	14.780.000	-	16

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP**

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut tahun 2023 permasalahan yang muncul saat ini perlu diidentifikasi secara komprehensif, agar hambatan yang mendesak dalam melaksanakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat diatasi. Dengan demikian, rencana kerja dapat tepat sasaran dan mampu menjawab semua permasalahan nyata yang dihadapi.

Permasalahan strategi yang harus menjadi perhatian selama tahun 2023 sehingga dapat direncanakan menjadi prioritas kinerja dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 terkait dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024 :

- 1) Meningkatnya penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- 2) Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD tahun 2020 sebagai bahan rencana tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022 (TW2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	√	54%	65%	65%	73%		30%	65%	73%	
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	-	√	80%	90%	95%	100%		50%	95%	100%	
3	Rasio Linmas Per 10.000 penduduk	-	√	39 orang	40 orang	45 orang	50 orang		40 orang	45 orang	50 orang	
4	Nilai Sakip	-	√	BB	BB	BB	A	BB	B	BB	A	

*Sumber Data : Satpol PP Kab. Garut*

### 2.2.1. Perkembangan Capaian Kinerja

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Satpol PP Kab. Garut telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Pada tahun 2021 Satpol PP Kab. Garut melaksanakan 2 program 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**  
**Tahun Anggaran 2021**

KODE	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA DAERAH	14.066.675.898	13.157.009.893	93,53
5.1	BELANJA OPERASI	13.551.791.298	12.651.819.893	93,36
5.2	BELANJA MODAL	514.884.600	505.190.000	98,12

*Sumber Data : Satpol PP Kab. Garut*

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 7.566.129.182,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.933.727.133,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.40.000.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan yaitu sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu:
  - a. Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,-. Output Sub kegiatan Penyusunan dokumen

perencanaan perangkat daerah yaitu jumlah dokumen perencanaan SKPD sebanyak 16 dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.5.598.089.048,- dengan realisasi sebesar Rp.4.980.578.255,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD ( Satpol PP ) sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output jumlah gaji dan tunjangan ASN (Satpol PP) selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki anggaran Rp. 5.543.299.048,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.926.277.755,-;
  - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan keluaran jumlah laporan Satpol PP sebanyak 10 laporan. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD memiliki anggaran sebesar Rp. 54.790.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 54.300.500,-.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.597.954.000,- dengan realisasi sebesar Rp.597.954.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP ) sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
  - a. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta

atribut kelengkapannya dengan keluaran jumlah pakaian kerja lapangan sebanyak 200 stel dan jumlah pakaian kerja tertentu sebanyak 200 stel. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya memiliki anggaran Rp. 597.954.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 597.954.000,-.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.497.462.190,- dengan realisasi sebesar Rp.496.576.935,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ( Satpol PP ) sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output jumlah komponen instalasi listrik sebanyak 20 item. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki anggaran sebesar Rp. 16.830.000 dengan realisasi sebesar Rp. 16.830.000;
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output jumlah alat kantor sebanyak 40 jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 25 jenis. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki anggaran sebesar Rp. 145.893.690 dengan realisasi sebesar Rp. 145.254.885;
  - c. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 7 jenis. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki anggaran sebesar Rp. 32.150.200 dengan realisasi Rp. 32.131.050;

- d. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan output jumlah makanan dan minuman sebanyak 25 orang. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu memiliki anggaran sebesar Rp. 44.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 44.397.000;
  - e. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 28 HOK dan jumlah rapat dalam rangka koordinasi dan pembinaan ke kecamatan sebanyak 103 HOK. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 258.188.300 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 257.946.000.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.147.868.000,- dengan realisasi sebesar Rp.138.800.000,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP ) sebesar 100%. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
- a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output adalah Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 4 kendaraan. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki anggaran Rp. 147.868.000 dengan realisasi sebesar Rp. 138.800.000.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.86.065.944,- dengan realisasi sebesar Rp.81.797.700,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. . Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Cakupan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ( Satpol PP ) sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki anggaran sebesar Rp. 48.998.144 dengan realisasi sebesar Rp. 44.730.300;
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output jumlah peralatan kebersihan dan upah kerja selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki anggaran sebesar Rp. 37.067.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.067.400,-.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.598.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp.598.020.243,-. Lokasi kegiatan yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, output sub kegiatan ini yaitu jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas operasional sebanyak 5 kendaraan. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan

anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 9.000.000,- ;

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, output sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan sebanyak 50 kendaraan dan 45 kendaraan. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 235.610.000,- dan realisasi sebesar Rp. 235.610.000,;
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, output sub kegiatan ini yaitu Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor sebanyak 3 lokal, jumlah penataan interior dan mabeulair sesuai dengan kebutuhan sebanyak 25 unit dan Prosentase gedung kantor sebanyak 1 lokal. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 343.570.000,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 342.910.243,-;
- d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, output sub kegiatan ini yaitu jumlah peralatan yang dipelihara sebanyak 25 unit. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 10.510.000,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 10.500.000,-.

## **2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp.6.500.546.716,- dengan realisasi sebesar

Rp.6.223.282.760,- yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan antara lain yaitu:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 5.568.074.716,- dan realisasi Rp. 5.300.836.760,-. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 85%. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ditopang dengan 7 (tujuh) sub kegiatan, diantaranya:
  - e. Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 1.884.709.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.817.949.350. Output sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yaitu jumlah masyarakat dan anak sekolah yang diberikan penyuluhan sebanyak 960 orang dan jumlah patroli pencegahan gangguan trantibum selama 12 bulan;
  - f. Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan anggaran sebesar Rp. 2.690.669.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 2.493.982.910 serta memiliki output jumlah penertiban gangguan tibum tranmas selama 12 bulan dan jumlah pengamanan tertentu selama 12 bulan;
  - g. sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman danketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 87.980.500 dan realisasi anggarannya sebesar Rp.

- 84.230.500 serta memiliki output jumlah gelar pasukan linmas dan lomba linmas sebanyak 2 kali dan jumlah monitoring dan evaluasi trantibum sebanyak 121 kali;
- h. Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 285.894.500 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 285.894.500 serta memiliki output yaitu 22 kali jumlah kegiatan linmas dalam trantibmas sebanyak 150 kali, jumlah pengamanan evakuasi korban bencana alam sebanyak 118 kali dan jumlah sosialisasi cegah dini bencana alam sebanyak 22 kali;
- i. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 157.250.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 157.208.000 serta memiliki output jumlah anggota satgas pol pp sebanyak 15 orang, jumlah anggota sat linmas yang terlatih 640 orang, jumlah aparatur satuan unit yang mengikuti pelatihan sebanyak 210 orang, jumlah aparatur yang mengikuti deteksi dini 10 orang, jumlah pembinaan anggota satgas pol. pp. merpati sebanyak 25 kali, jumlah peserta pelatihan dasar anggota sat linmas 750 orang, jumlah sat linmas yang mengikuti pembinaan 44 orang dan jumlah satpol pp yang mengikuti pelatihan dasar sebanyak 10 orang;
- j. Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 120.727.216 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 120.727.000 serta outputnya adalah jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti kesempatan jumlah gelar pasukan satpol pp dan linmas tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan jambore tk. provinsi sebanyak 2 kali;

- k. Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 340.844.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 340.844.500 serta outputnya yaitu jumlah linmas yang mendapatkan pakaian dan sarana prasarana sebanyak 215 stel dan jumlah senjata api sebanyak 6 unit.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 932.472.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 922.446.000 serta hasil dari kegiatan ini adalah Presentase penegakan perda dan perkara sebesar 85%. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
- a. Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 142.820.000,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 142.234.000 serta memiliki output jumlah koordinasi penanganan pelanggar perda dan perkara sebanyak 22 kali;
1. Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggarannya sebesar Rp. 65.930.000,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 65.920.000,- serta memiliki output Jumlah Kasus yang disidik dan diselidiki sebanyak 35 pelanggar, Jumlah Pengawasan Aparatur Satpol PP 40 kali, dan Jumlah Pengendalian Aparatur Sat. Pol. PP sebanyak 40 kali;
- m. Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 723.722.000,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 714.292.000,- serta memiliki output jumlah pelanggar perda dan perkara sebanyak 2724 pelanggar dan jumlah perusahaan sebanyak 850 pelanggar.

Dari sisi capaian kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut pada Tahun 2021 sudah menunjukkan progres yang menggembirakan dengan capaian 93,53 %, dengan uraian sebagai berikut :

a. Kegiatan yang melebihi target

Kegiatan yang melebihi target kinerja triwulan IV Tahun Anggaran 2021, sebagaimana ditetapkan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kab. Garut Tahun 2021 tidak ada.

b. Kegiatan yang telah memenuhi target

Seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi target sebagaimana ditetapkan pada Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Kegiatan yang belum atau tidak memenuhi target

Kegiatan yang belum atau tidak memenuhi target kinerja triwulan IV Tahun Anggaran 2021, sebagaimana ditetapkan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kab. Garut Tahun 2021 tidak ada.

d. Faktor penyebab tercapainya seluruh target kinerja triwulan IV Tahun Anggaran 2021 Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Garut adalah karena adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan Rencana Kerja untuk tahun 2021 sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya

peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

### **2.3.1 Sejauhmana Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut adalah menyangkut ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Garut terkait permasalahan-permasalahan seperti perizinan, pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dan unjuk rasa. Pada Tahun 2023, Kabupaten Garut dihadapkan dengan pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pilkada serentak dan Persiapan Pemilu Tahun 2024.

Isu –isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sesuai dengan RKPD Kab. Garut adalah :

- a. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum belum optimal;
- b. Penegakan Perda belum optimal;
- c. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah masih belum optimal;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP

Untuk itu, sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi : ketenteraman, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang diamanatkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sangat tinggi.

Kondisi tersebut seyogyanya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP Kab. Garut dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

#### 1) Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, di atas terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi, yaitu:

- (1) Pemahaman dan Ketaatan masyarakat terhadap Penegakan Perda masih rendah;

- (2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- (3) Sumber daya Satpol PP dilihat dari kuantitas; belum sebanding dengan jumlah penduduk;
- (4) Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2) Upaya Pemecahan

Dalam rangka upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang tertib, aman nyaman dan kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut telah melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan upaya-upaya persuasif terhadap masyarakat melalui pendekatan dialogis, dalam upaya mendorong kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk lebih berpartisipasi dalam menciptakan situasi dan kondisi kantrantibmas yang kondusif;
- (2) Intensifitas sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
- (3) Mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur Satpol.PP melalui Pembinaan dan pelatihan teknis dalam rangka upaya mewujudkan satpol.PP yang profesional dan proforsional dalam melaksanakan tugas;
- (5) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi Vertikal lainnya dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Satpol.PP dalam melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Garut telah disusun rencana program kegiatan tahun 2023 yang terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Yang juga harus menjadi perhatian adalah terkait visi jangka menengah Kabupaten Garut

***”Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”.***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yang menjadi bagian dari Satpol.PP adalah :

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun rumusan Review rencana program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

NO	Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	5				21.309.606.840	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21.309.606.840					
1	5	1			9.567.625.020	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.567.625.020					
1	5	1	2.01		48.400.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					48.400.000					
1	5	1	2.01		5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	
1	5	1	2.01		4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	4.500.000	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	5.000.000	
1	5	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	5.000.000	
1	5	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	3.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	3.100.000	
1	5	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	20.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	20.800.000	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	1	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.582.735.106	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.582.735.106	
1	5	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	6.461.439.206	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	6.461.439.206	
1	5	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	55.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	55.000.000	
1	5	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	66.295.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	66.295.900	
1	5	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				764.095.640	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				764.095.640	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	1	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	754.095.640	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	754.095.640	
1	5	1	2.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satpol PP	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Satpol PP	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>504.666.678</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>504.666.678</b>	
1	5	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.370.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.370.350	
1	5	1	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	79.268.672	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	79.268.672	
1	5	1	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	
1	5	1	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38.895.692	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38.895.692	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	1	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.724.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.724.000	
1	5	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	312.407.964	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	312.407.964	
1	5	1	2.06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	5.000.000	
1	5	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>923.738.090</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>923.738.090</b>	
1	5	1	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	793.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	793.000.000	
1	5	1	2.07	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	1	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	80.738.090	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	94.198.610	
1	5	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>81.369.306</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>81.369.306</b>	
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.453.306	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.453.306	
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.916.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.916.000	
1	5	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>662.620.200</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>662.620.200</b>	
1	5	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	10.890.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	10.890.000	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	1	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	285.088.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	285.088.200	
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	12.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	12.000.000	
1	5	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	279.642.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	279.642.000	
1	5	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	75.000.000	
1	5	2		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>11.741.981.820</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>11.741.981.820</b>	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	2	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.711.893.035	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.711.893.035	
1	5	2	2.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	360 Kasus	2.223.485.443	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	360 Kasus	2.223.485.443	
1	5	2	2.01	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	80 Kasus	4.373.109.097	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	80 Kasus	4.373.109.097	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	165.013.750	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	165.013.750	
1	5	2	2.01	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	287.375.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	287.375.000	
1	5	2	2.01	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang	380.550.500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang	380.550.500	
1	5	2	2.01	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	376.924.680	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	376.924.680	

NO				Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	5	2	2.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2006 Unit	2.200.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2006 Unit	2.200.000.000	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	525.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	525.000.000	
1	5	2	2.01	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	180.434.565	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	180.434.565	
1	5	2	2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>				<b>733.088.785</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>				<b>733.088.785</b>	
1	5	2	2.02	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	24 Laporan	212.960.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	24 Laporan	212.960.000	
1	5	2	2.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	40 Laporan	79.775.300	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	40 Laporan	79.775.300	

NO	Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana				
			dan Peraturan Bupati/Wali Kota					dan Peraturan Bupati/Wali Kota						
1	5	2	2.02	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2 Laporan	440.353.485	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2 Laporan	440.353.485	
1	5	2	2.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>				<b>297.000.000</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>				<b>297.000.000</b>	
1	5	2	2.03	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	297.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	297.000.000	
								<b>21.309.606.840</b>					<b>21.309.606.840</b>	

**Sumber Data : Satpol PP Kab. Garut**

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang masuk hasil pelaksanaan Musrenbang, baik tingkat Desa/ Kelurahan Maupun tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :

Usulan program dan kegiatan yang masuk ke Satpol PP Kab. Garut adalah sebanyak 31 usulan, namun sebanyak 28 usulan program dan kegiatan diakomodir dan berkenaan dengan tugas fungsi Satpol PP Kab. Garut sedangkan sebanyak 3 usulan program dan kegiatan tidak bisa diakomodir kemudian diarahkan ke SKPD terkait (seluruh usulan program dan kegiatan yang tidak diakomodir diarahkan adalah pengadaan sarana dan prasarana Siskamling). Alasan ditolaknya usulan program dan kegiatan tersebut karena belum adanya Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2023 sehingga disarankan menggunakan dari Anggaran Dana Desa.

Usulan program dan kegiatan yang diakomodir dengan total anggaran sebesar Rp. 194.500.000,- dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian/seragam Linmas sebanyak 19 usulan dengan anggaran sebesar Rp. 190.000.000,-;
2. Pembinaan Linmas Desa sebanyak 9 usulan dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000,-;

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Garut**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan pakaian/seragam Linmas	Kab. Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Linmas	190 stel	
2	Pembinaan Linmas Desa	Kab. Garut	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan Apatur Satpol PP dan Linmas	90 orang	

**Sumber Data : Satpol PP**

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 terdiri dari 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 tersebut, keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun ketiga dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada Prioritas Nasional (PN) point (3) diatas yaitu Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan isu strategis salah satu diantaranya adalah Pemenuhan Layanan Dasar dimana salah satu bentuk pelayanan dasar tersebut sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diantaranya Kualitas Nilai kehidupan dan Daya Saing Sumber daya Manusia juga Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah sosial.

Sedangkan isu stragis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sesuai RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta social yang dijabarkan dengan misi kesatu yaitu “ Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya”.

### **3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut**

Perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah “Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi kesatu yaitu “Mewujudkan Kualitas Masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Berbudaya”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu sasaran “Meningkatnya Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan dan Budaya Daerah” dengan strategi Peningkatan Tertib Hukum, Tertib Sosial dan Stabilitas Keamanan. Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang hendak dicapai pada tahun 2024 adalah “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban umum.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja**

Visi dan misi Kabupaten Garut harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional agar tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dapat tercapai. Tujuan dan sasaran itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### **Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Renja  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada tahun 2023
						2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>Terwujudnya Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>				Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	73%
			<b>Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>	1.1.	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65%
				1.2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	95%
				1.3	Rasio Linmas Per 10.000 penduduk	45 orang
				1.3	Nilai Sakip	BB

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP Kab. Garut**

Selain indikator tujuan/ sasaran yang disebutkan di atas berdasarkan Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Acara Republik Indonesia Nomor 1540) dan No.121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai indikator kinerja layanan masyarakat yang terkena dampak penegakan perda/perkada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**

**Indikator Kinerja SPM Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Garut**

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
		NSPK	IKK	Indikator Lain-nya	
1	2	3	4	5	8
1	Prosentase jumlah warga yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada yang mendapatkan pelayanan				100%

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP Kab. Garut**

**3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam pencapaian Target Kinerjanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut perlu ditunjang dengan program dan kegiatan. Pada tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud seperti yang terlihat pada tabel T-C.33. berikut ini :

**Tabel T-C.33.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21.309.606.840			23.440.567.524						
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.567.625.020			10.524.387.522						
1	5	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					48.400.000			53.240.000						
1	5	1	2.01	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	5.500.000
1	5	1	2.01	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	1 Dokumen dan 1 Laporan	100 %	4.500.000			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	4.950.000
1	5	1	2.01	3	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	1 Dokumen dan 1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	5.500.000
1	5	1	2.01	4	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	1 Dokumen dan 1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	5.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
		PP)										PP)							
1	5	1	2.01	5	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	1 Dokumen dan 1 Laporan	100 %	3.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	3.410.000
1	5	1	2.01	6	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	7 Laporan	100 %	20.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	22.880.000
1	5	1	2.01	7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	5.500.000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>6.582.735.106</b>				<b>7.241.008.617</b>				
1	5	1	2.02	1	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	46 Orang	100 %	6.461.439.206			Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	7.107.583.127
1	5	1	2.02	5	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	12 Laporan	100 %	55.000.000			Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	60.500.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.02	7	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	12 Laporan	100 %	66.295.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	72.925.490
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>764.095.640</b>			<b>840.505.204</b>		
1	5	1	2.05	2	11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	400 Paket	100 %	754.095.640			Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	829.505.204
1	5	1	2.05	5	12	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	12 Dokumen	100 %	10.000.000			Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	11.000.000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>504.666.678</b>			<b>555.133.346</b>		
1	5	1	2.06	1	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	1 Paket	100 %	20.370.350	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	22.407.385
1	5	1	2.06	2	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	3 Paket	100 %	79.268.672	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	87.195.539

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.06	3	15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	3 Paket	100 %	15.000.000			Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	16.500.000
1	5	1	2.06	5	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	2 Paket	100 %	38.895.692	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	42.785.261
1	5	1	2.06	8	17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	12 Laporan	100 %	33.724.000			Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	37.096.400
1	5	1	2.06	9	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	14 Laporan	100 %	312.407.964	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	343.648.760
1	5	1	2.06	10	19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	12 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	5.500.000
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>923.738.090</b>					<b>993.231.518</b>	
1	5	1	2.07	2	20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	5 Unit	100 %	793.000.000			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	857.493.428

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.07	5	21	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	2 Unit	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	55.000.000
1	5	1	2.07	6	22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	10 Unit	100 %	80.738.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100 %	80.738.090
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>81.369.306</b>			<b>89.506.237</b>			
1	5	1	2.08	2	23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	12 Laporan	100 %	33.453.306			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	36.798.637
1	5	1	2.08	4	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	12 Laporan	100 %	47.916.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	52.707.600
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>662.620.200</b>			<b>728.882.220</b>			
1	5	1	2.09	1	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	5 Unit	100 %	10.890.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	11.979.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	1	2.09	2	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	95 Unit	100 %	285.088.200		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	313.597.020	
1	5	1	2.09	6	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	15 Unit	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	13.200.000	
1	5	1	2.09	9	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	5 Unit	100 %	279.642.000		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	307.606.200	
1	5	1	2.09	10	29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	100 %	15 Unit	100 %	75.000.000		Persentase Pemeuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)	100 %	82.500.000	
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							<b>11.741.981.820</b>				<b>12.309.842.503</b>		
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>			<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>10.711.893.035</b>				<b>11.176.744.839</b>		
1	5	2	2.01	1	30	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	360 Kasus	6 jenis	2.223.485.443	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	2.445.833.987	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan		Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan Tranitibum dan Perlindungan masyarakat		100 %		2 jenis				Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %				
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas		100 %		1 jenis				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %				
		Persentase satlinmas yang aktif		Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas		70 %		3 jenis				Persentase satlinmas yang aktif	70 %				
1	5	2	2.01	2	31	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	80 Kasus	100%	4.373.109.097	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	4.810.420.007
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %				Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				100 %				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		
						Persentase satlinmas yang aktif				70 %				Persentase satlinmas yang aktif	70 %		
1	5	2	2.01	3	32	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen		165.013.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	181.515.125

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %				
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %				
		Persentase satlinmas yang aktif				70 %						Persentase satlinmas yang aktif	70 %				
1	5	2	2.01	4	33	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	1 Dokumen		287.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	287.275.000
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %					Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %	
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	
						Persentase satlinmas yang aktif				70 %					Persentase satlinmas yang aktif	70 %	
1	5	2	2.01	5	34	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	50 %	120 Orang		380.550.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	418.605.550

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	
		Persentase satlinmas yang aktif				70 %						Persentase satlinmas yang aktif	70 %	
					Jalan Bank No. 15 ( Kantor Kelurahan Paminggir ), Kab. Garut, Garut Kota, Paminggir		10 orang		500.000			4.500.000		
					Desa Godog (20 RW), Kab. Garut, Karangpawitan, Godog		10 orang		500.000					
					Desa Cibatu, Kab. Garut, Cibatu, Cibatu		10 orang		500.000					
					Desa, Kab. Garut, Cibalong, Sancang		10 orang		500.000					
					Kp Ciserehan Desa girimukti, Kab. Garut, Cikelet, Girimukti		10 orang		500.000					
					Desa Kertamukti, Kab. Garut, Cikelet, Kertamukti		10 orang		500.000					
					Desa Ciwangi, Kab. Garut, Bl. Limbangan, Ciwangi		10 orang		500.000					
					Kp.Tegal Buleud RT 02 RW 02, Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana		10 orang		500.000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase satlinmas yang aktif				70 %						Persentase satlinmas yang aktif	70 %	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		Kab. Garut Tarogong Kidul Sukagalih	50 %	30 Unit		525.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	577.500.000
				1	Desa Citeras, Kab. Garut, Malangbong, Citeras		10 orang		10.000.000			190.000.000		
				2	Desa Godog (20 RW), Kab. Garut, Karangpawitan, Godog		10 Unit		10.000.000					
				3	Desa Samudera Jaya, Kab. Garut, Caringin, Samuderajaya		10 Unit		10.000.000					
				4	Desa Cihaurkuning, Kab. Garut, Malangbong, Cihaurkuning		10 Unit		10.000.000					
				5	Desa Ciroyom, Kab. Garut, Cikelet, Ciroyom		10 Unit		10.000.000					
				6	Desa Caringin, Kab. Garut, Caringin, Caringin		10 Unit		10.000.000					
				7	Desa Linggarjati Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut,		10 Unit		10.000.000					
				8	Jl. Desa Kp.Cimacan RT 03 RW 04, Kab. Garut, Bayongbong, Hegarmanah		10 Unit		10.000.000					
				9	Desa Kertamukti, Kab. Garut, Cikelet, Kertamukti		10 Unit		10.000.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				10	DESA CIELA, Kab. Garut, Bayongbong, Ciela		10 Unit		10.000.000					
				11	Desa Sukamulya, Kab. Garut, Sukaresmi, Sukamulya		10 Unit		10.000.000					
				12	Jl. Guntur No. 178, Kab. Garut, Garut Kota, Kota Wetan		10 Unit		10.000.000					
				13	desa mekarsari, Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari		10 Unit		10.000.000					
				14	Desa Jagabaya Kecamatan Mekarmukti, Kab. Garut, Mekarmukti, Jayabaya		10 Unit		10.000.000					
				15	Desa Karangagung, Kab. Garut, Singajaya, Karangagung		10 Unit		10.000.000					
				16	desa padaawas, Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas		10 Unit		10.000.000					
				17	Desa Pananjung, Kab. Garut, Pamulihan, Pananjung		10 Unit		10.000.000					
				18	Kantor Desa Dunguswiru, Jalan Desa Dunguswiru No.01, Kab. Garut, Bl. Limbangan, Dunguswiru		10 orang		10.000.000					
				19	Seluruh Ds. Nyalindung, Kab. Garut, Cisewu, Nyalindung		10 Unit		10.000.000					

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	2	2.01	9	37	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	2 Laporan		180.434.565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	198.478.022
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %			Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %		
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %		
						Persentase satlinmas yang aktif				70 %			Persentase satlinmas yang aktif				70 %		
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.02</b>			<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>						<b>733.088.785</b>						<b>806.397.664</b>	
1	5	2	2.02	1	38	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada		50 %	24 Laporan	3 Jenis	212.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	234.256.000
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %			Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %		
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %		
						Persentase satlinmas yang aktif				70 %			Persentase satlinmas yang aktif				70 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	5	2	2.02	2	39	Pengawasan Atas Ketaatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Ketaatan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	40 Laporan	3 Jenis	79.775.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	87.752.830
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %		
						Persentase satlinmas yang aktif				70 %						Persentase satlinmas yang aktif	70 %		
1	5	2	2.02	3	40	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	2 Laporan	3 Jenis	440.353.485	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	50 %	484.388.834
						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan				100 %						Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan				100 %						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %		
						Persentase satlinmas yang aktif				70 %						Persentase satlinmas yang aktif	70 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	5	2	2.03		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>					<b>297.000.000</b>				<b>326.700.000</b>				
1	5	2	2.03	1	42	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Bersertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Aparatur SatpIPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	2 Laporan	30 Orang	297.000.000		Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang Bersertifikasi	50 %	326.700.000
							Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Sesuai Ketentuan			100 %					Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Sesuai Ketentuan	100 %		
							Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan			100 %					Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan	100 %		
							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			100 %					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		
							Persentase satlinmas yang aktif			70 %					Persentase satlinmas yang aktif	70 %		
							Persentase Satlinmas yang aktif			70 5					Persentase Satlinmas yang aktif	70 5		
<b>TOTAL</b>									<b>21.309.606.840</b>								<b>23.440.567.524</b>	

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP**

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja Tahun 2023**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sedangkan sub kegiatan perangkat daerah adalah menterjemahkan aktivitas/layanan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang ditetapkan pada tahun 2023 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2019-2024 serta diselaraskan dengan rencana pencapaian tolak ukur kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2019-2024. Penetapan indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah TA. 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	2	3	4
1	<b>Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65%
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	95%
		Rasio Linmas Per 10.000 Orang Penduduk	45 orang
		Nilai Sakip	BB

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP Kab. Garut**

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan disesuaikan dengan pernyataan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.

**Tabel 4.2.**  
**Indikator Kinerja Program**

		Sasaran Program	Program		Indikator Program	Target
		1	2		3	4
I	1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.1	Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai ketentuan	95
	2	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada		2.1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	95

	3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat		3.1	Persentase satlinmas yang aktif	70
	4	Meningkatnya kapasitas anggota Satpol PP dan Satlinmas		4.1	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	45
II	1	Meningkatnya kinerja aparaturnya Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Nilai Sakip	BB

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP Kab. Garut**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program indikatif kemudian diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Setiap program dan kegiatan diupayakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun berdasarkan kode rekening sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-103 Tahun 2021 dapat dilihat di lampiran. Untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menetapkan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

**Tabel 4.3.**  
**Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan ( Satpol PP )	100%	Satpol PP Kab. Garut
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	Satpol PP Kab. Garut
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik ( Satpol PP )	100%	Satpol PP Kab. Garut
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan (Satpol PP)	100%	Satpol PP Kab. Garut
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)	100%	Satpol PP Kab. Garut
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	100%	Satpol PP Kab. Garut
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)	100%	Satpol PP Kab. Garut
8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	6 jenis	Satpol PP Kab. Garut
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan	2 jenis	Satpol PP Kab. Garut

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
		masyarakat		
		Jumlah Pembinaan dan Penegakan disiplin Kode etik Lingkup Tugas Satpl PP dan Linmas	1 jenis	Satpol PP Kab. Garut
		Jumlah kegiatan Satlinmas dalam penanganan Tibumtranmas	3 jenis	Satpol PP Kab. Garut
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Tibumtranmas	100%	Satpol PP Kab. Garut
9	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	3 Jenis	Satpol PP Kab. Garut
10	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SatplPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	30 Orang	Satpol PP Kab. Garut

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP Kab. Garut**

**Tabel 4.4.  
Indikator Kinerja Sub Kegiatan**

	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
	1	2	3	4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Satpol PP Kab. Garut
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	Satpol PP Kab. Garut

	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen dan 1 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	Satpol PP Kab. Garut
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	Satpol PP Kab. Garut
12	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Satpol PP Kab. Garut
13	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	Satpol PP Kab. Garut

	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Satpol PP Kab. Garut
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Satpol PP Kab. Garut
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Satpol PP Kab. Garut
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	Satpol PP Kab. Garut
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Satpol PP Kab. Garut
21	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Satpol PP Kab. Garut
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Satpol PP Kab. Garut
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Satpol PP Kab. Garut

	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	Satpol PP Kab. Garut
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Satpol PP Kab. Garut
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	Satpol PP Kab. Garut
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	Satpol PP Kab. Garut
30	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	360 Kasus	Satpol PP Kab. Garut
31	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	80 Kasus	Satpol PP Kab. Garut
32	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Satpol PP Kab. Garut

	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
33	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Satpol PP Kab. Garut
34	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang	Satpol PP Kab. Garut
35	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	Satpol PP Kab. Garut
36	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2006 Unit	Satpol PP Kab. Garut
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	
37	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
38	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	24 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
39	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	40 Laporan	Satpol PP Kab. Garut

	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
	Bupati/Wali Kota	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
40	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2 Laporan	Satpol PP Kab. Garut
41	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	Satpol PP Kab. Garut

**Sumber Pengolah Data : Satpol PP Kab. Garut**

#### **4.2. Pendanaan Perangkat Daerah**

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2023. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol.PP Kabupaten Garut.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan Satpol.PP Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2023 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 21.309.606.840-

**Tabel 4.5**  
**Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pagu Indikatif Satuan Polisi**  
**Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	05						21,309,606,840						22,874,350,643					
1	05	001				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Satpol PP)	%	%	100 %	9,567,625,020			100 %	10,564,508,140			
1	05	001	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD Sesuai Ketentuan (Satpol PP)	%	%	100 %	48,400,000			100 %	53,240,000			
1	05	001	2.01	001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	5,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong,	Dokumen	2 Dokumen	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
											Demokrasi							
1	05	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Doku men	5,000,000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentrman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Doku men	1 Doku men	5,500,00 0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Doku men	3,100,000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentrman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Doku men	1 Doku men	3,410,00 0	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.05.001.2.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	20,800,000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Doku men	7 Laporan	22,880,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.001.2.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	5,000,000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Doku men	1 Laporan	5,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	001	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%		%	100 %	<b>6,582,735,106</b>					100 %	<b>7,301,508,617</b>		
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang	6,497,735,106	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Satpol PP	46 Orang	7,168,083,127	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				12 Laporan	35,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman	Satpol PP	12 Laporan	60,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Keuangan Akhir Tahun SKPD									dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi				
1	05 00 1 2.0 2 00 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD			12 Lapo ran	50,000,000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraran dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Satpo 1 PP	12 Lapo ran	72,925,4 90	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 00 1 2.0 5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur dengan Kondisi Baik (Satpol PP)		%	100 %	<b>764,095,640</b>						100 %	<b>840,505, 204</b>	
1	05 00 1 2.0 5 00 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			400 Pa ket	754,095,640	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama,	Sekre tariat Satpo 1 PP	400 Pa ket	829,505, 204	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
										ih	Umum		Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi						
1	05	00 1	2.0 5	00 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dok umen	10,000,000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekre tariat Satpo 1 PP	12 Dok umen	11,000,0 00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	00 1	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Satpol PP)	%		%	100 %	<b>504,666,678</b>						100 %	<b>557,634, 345</b>	
1	05	00 1	2.0 6	00 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera				1 Paket	20,370,350	Kab. Garut, Tarogon g Kidul,	Dana Transfer Umum- Dana		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan	0	1 Paket	22,407,3 85	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian n RKPD Tahun 2021	Prakira an Capaian n Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
		Bangunan Kantor						Sukagalih	Alokasi Umum		Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi							
1	05 00 1	2.0 6	00 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	79,268,672	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	0	3 Paket	87,195,539	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 00 1	2.0 6	00 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	15,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	16,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.001.2.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	38,895,692	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	0	2 Paket	42,785,261	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.001.2.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	33,724,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	0	12 Laporan	39,596,400	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.001.2.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				14 Laporan	312,407,964	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama,	0	14 Laporan	343,649,760	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Konsultasi SKPD						ih	Umum		Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi					
1	05 00 1	2.0 6	01 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD			12 Dok umen	5,000,000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	0	12 Dok umen	5,500,00 0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 00 1	2.0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur dengan kondisi baik (Satpol PP)		%	100 %	<b>923,738,090</b>				100 %	<b>993,231, 518</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.001.2.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	793,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	5 Unit	857,493,428	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.001.2.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	50,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	2 Unit	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.001.2.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	80,738,090	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama,	Sekretariat Satpol PP	10 Unit	80,738,090	Satuan Polisi Pamong Praja	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelo mpok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	47,916,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	12 Laporan	52,707,600	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	001	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Aparatur Dengan Kondisi Baik Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Satpol PP)	%	%	100 %	<b>662,620,200</b>						100 %	<b>728,882,220</b>		
1	05	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				5 Unit	10,890,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong	Sekretariat Satpol PP	5 Unit	11,979,000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi				
1	05 00 1 2.0 9 00 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			95 Unit	285,088,200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Sekretariat Satpol PP	95 Unit	313,597,020	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 00 1 2.0 9 00 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	12,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik	Sekretariat Satpol PP	15 Unit	13,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian R KPD Tahun 2021	Prakira an Capaian Target R KPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 00 2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase anggota Satpol PP dan Satlinmas yang bersertifikasi	%		%	50 %	11,741,981, 820						50 %	12,309,8 42,503	
		Persentase Penegakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai ketentuan	%		%	100 %							100 %		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%		%	100 %							100 %		
		Persentase satlinmas yang aktif	%		%	70 %							70 %		
1 05 00 2 2.0 1	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	Jenis		Jenis	12 Jeni s	10,711,893, 035						12 Jeni s	11,176,7 44,839	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian R KPD Tahun 2021	Prakira an Capaian Target R KPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		ta														
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penindakan penyelenggaraan gangguan Trantibum	Jenis		Jenis	6 Jenis						6 Jenis				
		Persentase SATPOL PP yang bersertifikasi	%		%	100 %						100 %				
1	05	00	2.0	00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,						2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyaraka t, Aparatur dan Badan Hukum	360 Kasus	2,445,833,987	Satuan Polisi Pamong Praja



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.05.002.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	165,013,750	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	12 Dokumen	181,515,125	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.002.004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				168 Dokumen	287,375,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketenteraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	168 Dokumen	287,275,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.05.002.2.01.005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				120 Orang	380,550,500	Kab. Garut, Tarongg Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	120 Orang	418,605,550	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.002.2.01.006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	376,924,680	Kab. Garut, Tarongg Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	4 Dokumen	414,617,148	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.002.2.01.007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban				2006 Unit	2,725,000,000	Kab. Garut, Tarongg Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama,	Masyarakat, Aparatur	2006 Unit	2,420,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
		Ketertiban Umum	Umum yang Tersedia					ih	Umum		Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	dan Badan Hukum						
1	05	002	2.01	009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	180,434,565	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	2 Laporan	198,478,022	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	002	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah kegiatan sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan Perda dan Perkada	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>733,088,785</b>					3 Jenis	<b>806,397,664</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP D Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.002.2.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				56 Laporan	212,960,000	Kab. Garut, Tarong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	56 Laporan	234,256,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.002.2.0002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				40 Laporan	79,775,300	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum	40 Laporan	87,752,830	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.002.2.0003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan				150 Laporan	440,353,485	Kab. Garut, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum - Dana	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan	Masyarakat, Aparatur	150 Laporan	484,388,834	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian R KPD Tahun 2021	Prakira an Capaian Target R KPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
	Bupati/Wali Kota	Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP						tan, Semua Kelurah an	Alokasi Umum		Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	tur dan Bada n Huku m						
1	05	00 2	2.0 3		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Aparatur SatplPP yang bersertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Orang	Orang	30 Ora ng	<b>297,000,000</b>			30 Ora ng	<b>326,700, 000</b>				
1	05	00 2	2.0 3	00 1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegekan			10 Lapo ran	297,000,000	Kab. Garut, Tarogon g Kidul, Sukagal ih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Apara tur Satpo l PP	10 Lapo ran	326,700, 000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKP Tahun 2021	Prakira an Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasar an	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perda dan Perkada													
<b>TOTAL</b>							21,309,606, 840						22,874,3 50,643		

*Sumber Data : Satpol PP Kab. Garut*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian**

Dalam menyusun RENJA SKPD Tahun Anggaran 2023 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut selama kurun waktu Satu tahun. Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Garut juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023. Adapun fungsi dari Renja Tahun 2023 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2021 bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan Penjabaran Tahunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tahun 2023 yang memuat prioritas kegiatan dan Pendanaan indikatif. Kondisi terjadinya pandemi global Covid 19 yang mungkin berdampak pada ketidakpastian ketercapaian target, dalam hal ini memaksa perangkat daerah untuk selalu berkolaborasi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan program.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Satpol PP Kab. Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada

Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut Tahun 2020 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Dalam Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut.
- c. Dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 ini, acuan utama yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan, arah Kebijakan Umum – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Garut dan rencana program indikatif dinas yang telah dirembukkan dengan seluruh unsur pelaku pembangunan Pengelolaan Keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut.
- d. Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut Kabupaten Garut, yang menggambarkan program prioritas pembangunan daerah juga merupakan

Acuan dalam penggunaan APBD serta sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.

- e. Proses penyusunan Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum SKPD, konsultasi publik dan forum lintas pelaku yang dituangkan dalam rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sesuai kewenangannya.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka Pencapaian sasaran Perangkat daerah dan program-program yang direncanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;
- b. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan dengan memperhatikan peran dan fungsi masing masing perangkat daerah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berorientasi hasil atau manfaat.
- c. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satpol PP kami disusun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**